

PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MARJINAL: STUDI KASUS DI PULAU BAWEAN, INDONESIA

Hasanul Bulqiyah¹, Sholeh Muadi², dan George Towar Ikbal Tawakkal³

¹Mahasiswa Magister Ilmu Sosial, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia.

²Departemen Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia.

³Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

E-mail: hasanulbulqiyah@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki pemilihan umum sesuai dengan tingkatannya, yang mana adanya pemilihan umum seharusnya memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan pembangunan di suatu daerah, tapi tidak dengan pulau Bawean. Tulisan ini mengkaji tentang ketertarikan pemilih di Pulau Bawean pada pemilihan umum lokal (pemilihan kepala desa). Pulau Bawean yang merupakan bagian dari Kabupaten Gresik memiliki ketimpangan pembangunan yang dirasakan, kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah Kabupaten Gresik tidak sepenuhnya terlaksana pada pulau Bawean. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan data wawancara mendalam pada masyarakat dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwasanya masyarakat Pulau Bawean lebih tertarik pada pemilihan kepala desa dibandingkan pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik dan Pemilihan Legislatif Kabupaten Gresik dilihat dari partisipasi pada ketiga pemilihan tersebut. Alasan masyarakat lebih tertarik pada pilkades karena kedekatan antara masyarakat dengan kepala desa menjadi modal utama dalam mengikuti partisipasi politik, sehingga masyarakat lebih nyaman dalam melakukan komunikasi terhadap pembangunan-pembangunan di desa.

Kata kunci: Pilkades; pemilu; perilaku memilih; Pulau Bawean.

THE VILLAGE HEAD ELECTION AND PARTICIPATION OF MARGINAL COMMUNITY: A CASE STUDY IN BAWEAN ISLAND, INDONESIA

ABSTRACT

The general elections in Indonesia should have performed a significant influence on the sustainability of development in a region. However, in Bawean island, a sub-region in Gresik Regency, there was a developmental imbalance because the Gresik Regency government has not implemented the proper policy on the island. This paper examines the voters' interest in the village head election in Bawean Island. This paper used a qualitative descriptive approach with an in-depth interview method and examining the relevant documents about elections in Bawean island. The result of this study found that Bawean Island's citizens were more interested in village head elections than the Regional Head Election and the Legislative Election as can be seen from their high voter turnout in the last three elections. The absence of significant upbuilding compare to the regional capital city of Gresik makes the people of Bawean Island feel alienated so that people perceive the general elections has no impact on their lives. On the other side, the village head elections have higher support as the Bawean people hopes to make their living better.

Key words: *village head election; election; voting behavior; Bawean Island*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan demokrasi menjadi momen yang krusial bagi negara Indonesia, sebab warga negara memiliki hak untuk berkontribusi dalam memilih pemimpin politik yang mencalonkan diri pada pemilihan untuk mendapatkan dukungan suara. Jika dilihat dari prespektif normatif pengertian menurut Robert A. Dahl, demokrasi merupakan sistem yang secara mutlak bertanggung jawab pada

warga negaranya, namun dari prespektif empirik seperti Joseph Schumpeter, demokrasi merupakan sistem untuk memilih pengambil keputusan melalui pemilu periodik. (Hidajat, 2012). Pentingnya partisipasi rakyat di negara demokrasi sangat menentukan keberlangsungan hidup suatu negara, maka rakyat memiliki *power* dalam pengambilan keputusan di bidang politik dan bidang pemerintahan, melalui keterwakilan maupun langsung dan pernyataan pendapat baik lisan ataupun tulisan yang dilindungi secara

konstitusional (Gadjong, 2007). Karenanya hakikat dari demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Supaya hakikat dari demokrasi bisa dirasakan oleh rakyat, pemilu menjadi salah satu instrumen dalam menyampaikan aspirasi ataupun memperjuangkan kebutuhan rakyat. Pemilu menjadi tempat arena kontestasi bagi para elite politik untuk maju menjadi pemimpin baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Indonesia memiliki banyak pemilihan yang melibatkan rakyat sebagai dasar dari demokrasi yang di gunakan, mulai pemilihan tingkat lokal hingga ke tingkat nasional. Pemilihan tersebut meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Lembaga Legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat Propinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota. Kemudian ditingkat paling bawah yaitu Pemilihan Kepala Desa yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2017.

Dari setiap pemilihan yang ada, sepatutnya sistem tersebut memiliki regulasi dan dampak yang baik pada kehidupan masyarakat, sehingga banyak pertimbangan yang ada di pikiran masyarakat untuk berpartisipasi pada pemilihan yang menguntungkan, yang mana masyarakat Bawean selama ini hanya menjadi masyarakat yang apatis pada pemilihan. Apatis yang dimaksud disini yakni bukan tentang apatis partisipasi masyarakat pada pemilihan, melainkan masyarakat tidak terlalu berpikir jauh tentang pemilihan mulai dari calon kandidat, program yang ditawarkan serta visi misi ataupun latar belakang dari kandidat. Menurut Moris Rosenberg (dalam Rush & Altrhof, 2001) mengemukakan bahwasanya ada tiga alasan pokok seseorang untuk bersikap apatis pada aktivitas politik, *pertama* karena ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivitas politik, orang memiliki anggapan bahwasanya politik merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup, *kedua* orang memiliki anggapan untuk berpartisipasi dalam politik merupakan hal yang sia-sia, sehingga tidak ada gunanya untuk berpartisipasi karena tidak mempengaruhi proses politik, *ketiga* tidak memiliki rangsangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, karena politik tidak lebih

penting dari pada menyelesaikan pekerjaan atau rutinitas seseorang. Kemudian banyaknya pemilihan membuat masyarakat bingung dalam memberikan hak suaranya, satu contoh pada pemilihan legislatif dalam satu kertas suara dengan ukuran yang sangat besar di isi beberapa kolom partai politik yang terdiri dari beberapa nama calon legislatif. Banyaknya partai politik membuat ketidak stabilan dalam pemilihan, walaupun demikian hanya beberapa partai politik yang terlihat aktif pada pemilu. maka ketertarikan masyarakat terhadap pemilu tentu berbeda-beda. Berbagai kajian terdahulu telah menunjukkan ketertarikan dan alasan-alasan kenapa tertarik. Namun pada penelitian ini belum ada yang mengkaji tentang ketertarikan dan kondisi pembangunan.

Beberapa literatur dipaparkan dalam artikel ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin (2015), terkait ketertarikan pemilih dengan penelitian Partisipasi Politik dan perilaku Memilih Pada Pemilu 2014. Dalam temuannya, ketertarikan pemilih dibagi dalam tiga faktor yang pertama sosiologis, kedua psikologis, ketiga rasional. Pada faktor sosiologis politik aliran menjadi kriteria utama bagi pemilih, sehingga pemilih lebih tertarik untuk memilih calon dan partai politik yang memiliki kesamaan latar belakang. Faktor psikologis, media menjadi ketertarikan pemilih dalam memilih calon pemimpin ataupun partai politik dengan banyaknya pemberitaan. Pada faktor rasional kondisi ekonomi pemilih menjadi dasar dari ketertarikan untuk memilih calon yang mampu memberikan kesejahteraan.

Penelitian berikutnya dari Radityo Rizki Hutomo (2015) terkait ketertarikan pemilih pada pemilu dengan judul perilaku memilih warga Surabaya dalam pemilu legislatif 2014 (hubungan kesesuaian program kandidat, kampanye, identifikasi partai dan pemberian imbalan uang dalam menentukan pilihan partai politik dalam pemilu legislatif 2014) yang menjelaskan bahwa 76% responden menggunakan pertimbangan program kandidat yang ditawarkan pada masyarakat dalam menentukan pilihan dan 24% menjawab tidak menggunakan pertimbangan program kandidat dalam menentukan pilihannya. Perilaku pemilih di Kota Surabaya lebih tertarik memilih pada kandidat yang memiliki program kerja yang bagus nantinya, selain itu ketertarikan pemilih dalam pemilu juga didukung dengan sosialisasi atau

kampanye yang menarik. Sedangkan identifikasi partai tidak menjadi ketertarikan pemilih dalam memberikan hak suaranya pada pemilu, kemudian pemberian imbalan bagi masyarakat Kota Surabaya tetap menjadi moment yang menguntungkan namun tidak menjadi faktor penentu utama dalam melibatkan pertimbangan untuk memberikan hak suaranya pada pemberi imbalan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Daud M. Liando (2016) dengan judul pemilu dan partisipasi politik masyarakat (studi pada pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan calon wakil presiden di Kabupaten Minahasa tahun 2014) yang menemukan bahwa masyarakat memberikan suara atau tertarik pada pemilihan legislatif di Kabupaten Minahasa dikarenakan terdapat *money politic* dengan total 17.11% dari jawaban yang menjadi responden dalam penelitian, selain itu pada pemilihan legislatif masyarakat Kabupaten Minahasa tidak memberikan suara dengan alasan tidak percaya pada janji-janji calon sebesar 18,25% dari total responden. Kemudian pada pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden ketertarikan masyarakat di Kabupaten Minahasa memberikan suaranya pada pemilihan presiden dan calon wakil presiden karena kesenangan/simpaty calon presiden dengan total 18,25% dari responden dalam penelitiannya, selain itu 17,87% tidak memberikan suara pada pemilihan presiden dan wakil presiden karena tidak percaya dengan janji-janji yang diucapkan pada saat kampanye. Selain itu, salah satu faktor penyebab masyarakat tidak berpartisipasi adalah lemahnya sosialisasi dari panitia kepada masyarakat tentang ketentuan pemberian suara. Karena masyarakat beranggapan bahwasanya untuk mengikuti partisipasi pada pemilihan umum harus mendapatkan undangan tertulis dari panitia, selain itu tidak memberikan suara pada pemilihan umum 2014 karena ketidakpercayaan masyarakat pada elit politik baik pada janji-janji saat kampanye ataupun pada visi dan misi yang ditawarkan pada masyarakat, sampai adanya ketidakpercayaan masyarakat dalam memilih apakah akan memberikan pengaruh ataukah kerugian yang akan didapatkan pada masyarakat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada di mana ketertarikan pemilih pada pemilu di penelitian lebih diartikan sebagai ketertarikan pemilih yang dilihat dari tiga factor: 1) faktor sosiologis lebih memilih

pada kesamaan latar belakang kandidat pada pemilu; 2) faktor psikologis pemilih lebih tertarik pada pemberitaan calon di media; dan 3) faktor rasional kondisi ekonomi pemilih menjadi dasar untuk memilih calon yang mampu mensejahterakan masyarakat. Kemudian di sisi lain, ketertarikan pemilih ini juga lebih dilihat dari seberapa berminat mereka pada kandidat yang memiliki program kerja bagus, selain itu pemilih lebih tertarik jika kampanye yang digunakan menarik. Kemudian ketertarikan pemilih pada pemilu karena terdapat *money politics* dan juga rasa kesenangan/simpaty pada kandidat.

Sedangkan tulisan ini lebih mengkaji tentang ketertarikan pemilih pada sebuah pemilihan umum yang berdampak langsung terhadap pulau Bawean seperti Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik, Pemilihan Legislatif Kabupaten Gresik dan Pemilihan Kepala Desa. Penulis ingin melihat bagaimana ketertarikan pemilih di pulau Bawean dengan pemilihan-pemilihan yang ada tersebut dengan kondisi pulau Bawean saat ini yang secara nyata pembangunan tidak merata jika dibandingkan dengan kota Gresik sebagai pusat pemerintahan wilayah kabupaten.

Pulau Bawean yang merupakan bagian dari Kabupaten Gresik terpisah oleh daratan pulau Jawa sekitar 120 kilometer sebelah utara Gresik, pulau Bawean memiliki dua administrasi wilayah kecamatan yakni Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak dengan total penduduk secara keseluruhan pada tahun 2017 sebanyak 106.802 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2019). Pemerintah sudah seharusnya menjadi motor penggerak masyarakat untuk keluar dari permasalahan sosial dan ekonomi yang di hadapi. Kebijakan-kebijakan yang dibuat harus pro terhadap seluruh elemen masyarakat dan harus bersifat adil namun tidak pada masyarakat pulau Bawean yang induk pemerintahan daerahnya ada di Kabupaten Gresik. Di pulau Bawean pembangunan sangat tertinggal jika dibandingkan dengan daerah Gresik kota, salah satu pembangunan yang menjadi landasan perbandingan dengan Gresik kota yaitu pembangunan jalan. Pembangunan jalan di Pulau Bawean sudah pada pembaharuan dengan menggunakan pavingisasi, namun tanpa ada perawatan secara berkala jalan lingkaran Bawean menjadi rusak kembali mulai dari terkikisnya batu paving, longgarnya batu paving, dan lain sebagainya, yang dinilai membahayakan

pengguna jalan. Selain itu jalan menuju pelosok desa masih sangat buruk, sempitnya jalan membuat masyarakat untuk bergantian dalam menggunakan jalan serta banyaknya jalanan berlubang dan sebagian berbentuk tanah.

Demokrasi menjamin kebebasan berbicara setiap orang dan berhak bersuara di ruang publik yang hakikatnya merupakan arena kontestasi untuk menjadi pemenang perebutan opini, rakyat berhak menentukan pemerintahan yang baik dan dianggap mampu memenuhi kebutuhan dengan cara melalui pemilu. Menurut McClosky (dalam Budiarjo, 1998) bahwasanya partisipasi politik merupakan suatu kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Sesuai dengan konsep partisipasi politik yang mana warga dapat mengambil bagian dalam menentukan penguasa melalui pemilihan sebagai proses untuk pembentukan suatu kebijakan, maka jika diinterpretasikan pada masyarakat Pulau Bawean, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum, di antaranya adalah: *Pertama*, tingkat pekerjaan masyarakat yang membuat masyarakat untuk peduli pada politik sehingga berpartisipasi pada pemilihan dan membuat masyarakat jauh pada partisipasi politik. Melalui pekerjaan, masyarakat paham dengan kondisinya sehingga merasa perlu untuk melakukan pengambilan keputusan dalam pemilihan guna mendapatkan perubahan-perubahan yang akan dirasakan baik bagi dirinya ataupun bagi Pulau Bawean. Di sisi lain, pekerjaan juga bisa menjauhkan masyarakat pada partisipasi politik pemilihan, sebab masyarakat berpikir walaupun ikut berpartisipasi kemungkinan besar tidak akan ada perubahan bagi dirinya dan Pulau Bawean. Hal ini dirasakan karena kekecewaan masyarakat pada pemilihan yang tidak begitu nampak suatu perubahan pada pembangunan di Pulau Bawean.

Kedua, tingkat pendidikan masyarakat di mana tidak sedikit masyarakat Pulau Bawean minim akan pendidikan apalagi pendidikan politik. Hal ini sangat berpengaruh pada partisipasi politik dalam pemilihan, misalnya, banyak masyarakat yang hanya lulus SD tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP karena tidak ada biaya, begitupun juga lulusan SMP tidak bisa melanjutkan ke SMA, hingga ke

perguruan tinggi. Hal ini sangat mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi politik pada pemilihan, karena kurangnya penanaman karakter pendidikan pada masyarakat sehingga masyarakat bisa apatis pada pemilihan.

Ketiga, tingkat pengetahuan masyarakat Pulau Bawean pada politik sangat kecil, di mana banyak masyarakat yang tidak paham makna dari politik, bagaimana prosedur politik dan sebagainya sehingga banyak masyarakat yang hanya ikut-ikutan saja pada pemilihan tanpa kesadaran yang nyata pada dirinya.

Maka perlu dilakukan kajian tentang pemilu: apakah yang paling menarik dan menjadi sandaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji ketertarikan pemilih Pulau Bawean pada pemilu, dengan berbagai jenis pemilu yang ada. Peneliti ingin melihat persepsi masyarakat pada pemilu dan pengaruh yang dirasakan oleh masyarakat Pulau Bawean.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif sebuah metode penelitian untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya sebuah perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya (Herdiandyah, 2010). Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini yaitu data primer berupa wawancara mendalam, kemudian tulisan ini juga menggunakan data sekunder berupa dokumentasi.

Penelitian dilakukan kurang lebih selama tiga bulan pada tahun 2019 di pulau Bawean Kabupaten Gresik. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive dan random. Penentuan secara purposive ditujukan kepada perwakilan KPU Kabupaten Gresik. Sedangkan random digunakan untuk menentukan informan yang berlatar belakang tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Randomisasi informan masyarakat umum didasarkan tiga kriteria, yakni masyarakat berpenghasilan tinggi (>7,5 Juta), masyarakat berpenghasilan menengah (5 Juta-7,5 Juta), dan masyarakat berpenghasilan rendah (0-5 Juta). Sedangkan data sekunder yang digunakan antara lain hasil perolehan suara pemilu yang didapatkan dari KPU Kabupaten Gresik serta hasil perolehan suara pilkades yang didapatkan dari tiga puluh desa di pulau Bawean

dengan rincian tujuh belas desa di Kecamatan Sangkapura dan tiga belas desa di Kecamatan Tambak serta berita media massa.

Demi akurasi data dan informasi, maka peneliti melakukan validitas data dengan member check melalui triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara serta berbagi waktu (Sugiyono, 2017). Setelah data semua dikumpulkan maka langkah selanjutnya analisis data dengan menggunakan teknik analisis model interaksi yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (Miles & Huberman & Saldana, 2014) yaitu pengumpulan data, kondensasi data, display data, kesimpulan/ verifikasi. Hasil pengumpulan data ini kemudian dilakukan kondensasi data untuk memfokuskan data-data yang digunakan setelah itu data akan di display sesuai dengan peneglompokan tema-tema.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pulau Bawean yang Terasingkan Oleh Pembangunan

Pembangunan pada suatu wilayah merupakan hal mendasar yang dibutuhkan masyarakat, tanpa adanya pembangunan masyarakat disuatu wilayah tersebut akan mengalami kegagalan dalam pertumbuhan. Selain itu tidak tepatnya pelaksanaan pembangunan juga akan memberikan perihai yang tidak baik bagi masyarakat. Pada wilayah-wilayah terkecil pembangunan mungkin menjadi kata yang asing didengar oleh masyarakat setempat, seperti Pulau Bawean yang merupakan pulau kecil bagian dari Kabupaten Gresik.

Pembangunan di Pulau Bawean sangat kurang terlihat, bahkan pembangunan yang ada hanya menjadi sebuah korelasi sepiantasnya dari kebijakan yang dibuat pemerintah secara umum. Seperti infrastruktur yang ada di Bawean yakni jalan raya yang telah dilakukan pembangunan jalan dengan memberikan pavingisasi di seluruh jalan raya pulau Bawean, tetapi setelah dilakukannya pembangunan jalan berupa pavingisasi masih menjadi *problem*, sebab kondisi jalan yang menggunakan pavingisasi saat ini banyak yang rusak, seperti retaknya batu paving, dan batu paving yang peletaknya telah longgar banyak ditemui. Tidak adanya penerangan jalan di pulau Bawean membuat masyarakat harus berhati-hati dalam

mengendara di jalan raya. selain itu transportasi menuju Pulau Bawean ke Pulau Jawa begitupun sebaliknya masih menjadi permasalahan yang datang setiap tahunnya, hal ini karena keterbatasan transportasi umum yang melayani masyarakat Bawean, belum lagi jika pada waktu cuaca buruk yang melanda perairan Laut Jawa dan perairan Laut Bawean. Saat ini untuk menuju Pulau Bawean ataupun ke Pulau Jawa hanya dilayani dua jenis transportasi umum yaitu transportasi laut dan transportasi udara, walau memiliki dua jenis transportasi umum, hal ini masih belum menjawab kebutuhan masyarakat Pulau Bawean secara luas, artinya transportasi laut yang di layani oleh tiga armada pada setiap harinya tidak bisa meminimalisir arus keluar masuk barang dan orang, selain itu adanya transportasi udara yang memiliki *airport* dengan *runaway* sepanjang 900 meter yang dilayani jenis maskapai *twin otter* atau penumpang sebanyak dua belas orang belum juga menekan angka banyaknya orang yang ingin menuju ke Pulau Bawean. Pembangunan transportasi menjadi modal utama dalam memecahkan salah satu permasalahan yang dialami oleh masyarakat Pulau Bawean, karena jika sulitnya transportasi untuk menuju ke Pulau Bawean dari Pulau Jawa ataupun sebaliknya akan menghambat aktivitas masyarakat Bawean yang memiliki kepentingan di luar Pulau Bawean dan membuat terisolasinya Pulau Bawean.

Dalam segi ekonomi, pendapatan masyarakat secara rata-rata sangat kecil tetapi biaya beli tergolong mahal dengan pendapatan yang diterima masyarakat di Pulau Bawean, pembangunan perekonomian di Pulau Bawean perlu ditegakkan guna memberikan kesejahteraan pada masyarakat pulau Bawean. Pembangunan ekonomi pedesaan sangat cocok untuk di terapkan di Pulau Bawean, hal ini harus mengusung konsep desa mandiri, sehingga harus dilakukannya pemberdayaan masyarakat dengan cara produksi di bidang pertanian, perikanan, perdagangan, perkebunan dan peternakan. Pemberdayaan masyarakat desa secara strategis dapat dilakukan melalui pembangunan agribisnis pedesaan, maka perlu adanya pengembangan sektor pertanian melalui agribisnis yang kuat untuk bisa melaksanakan pendistribusian di bidang ini (Husaeni, 2017).

Selain itu, pembangunan pendidikan di Pulau Bawean perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era industri 4.0, artinya

pendidikan di pulau Bawean dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi perlu diberikan sarana fasilitas yang memadai untuk menghambat ketertinggalan dengan wilayah lain, seperti pembangunan gedung pendidikan, ataupun buku-buku pelajaran dan diperkuatnya jaringan internet ataupun penyediaan distribusi fasilitas komputer yang bisa digunakan pada waktu pelaksanaan ujian nasional, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung hal-hal tersebut membantu dalam perkembangan peserta didik untuk berpikir maju dan giat dalam melakukan kegiatan belajar, selain mendapatkan pemahaman *intelligence quotient* (IQ) pada saat belajar mengajar juga memberikan kekuatan keterampilan pada peserta didik.

Pulau Bawean yang secara demografi merupakan pulau keil yang berada di utara Laut Jawa sudah sepantasnya memiliki kekayaan alam, salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Pulau Bawean yakni pariwisata. Di Pulau Bawean pariwisata menjadi salah satu tujuan dari wisatawan lokal maupun internasional, wisata di Pulau Bawean terkenal dengan wisata bahari, kemudian wisata air terjun dan wisata alam lainnya. Namun dengan banyaknya pariwisata yang dimiliki Pulau Bawean belum bisa menjadi tujuan wisata terstruktur, artinya wisata di Pulau Bawean tidak dilakukan pembangunan oleh pemerintah Kabupaten Gresik. Banyak wisata alam yang dibiarkan begitu saja tanpa ada campur tangan dengan kebijakan pariwisata yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPKA) Kabupaten Gresik.

Pada saat mempromosikan daerah Kabupaten Gresik wisata Pulau Bawean menjadi sorotan utama dalam memperkenalkan Gresik dengan berbagai wisata-wisata yang lain yang berada di dataran Gresik. Akan tetapi tempat-tempat pariwisata di Pulau Bawean tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti mulai dari tidak adanya toilet di tempat wisata, dan jalan menuju ke tempat wisata sangat berbahaya. Pariwisata di Pulau Bawean dengan permasalahan tersebut jauh dikatakan sebagai *real tourism*. Padahal ketika pariwisata di Pulau Bawean benar-benar dikelola secara maksimal oleh Kabupaten Gresik bisa meningkatkan pendapatan masyarakat mulai dari penjaga wisata, karcis, ataupun penjual makanan di tempat wisata dan *guide tour* wisata di pulau Bawean.

Menjelang pemilihan, banyak pihak yang melakukan aksi politik terhadap Pulau Bawean,

satu contoh pada saat pemilihan kepala daerah Kabupaten Gresik 2013, pariwisata di Pulau Bawean akan di *make over* seperti Pulau Bali tetapi dengan konsep pariwisata Islami seperti di Lombok sesuai dengan budaya Pulau Bawean, sehingga menjadi trend di seluruh Pulau Bawean dan daerah sekitar, dengan sebutan Pulau Bawean sebagai “Bali-nya” Jawa Timur. Akan tetapi, sampai saat ini pariwisata di Pulau Bawean nampak biasa-biasa saja tanpa ada perubahan sedikitpun. Pada pertengahan 2019, Pulau Bawean menjadi tuan rumah dari wisatawan mancanegara yang diangkut menggunakan kapal *cruise ship* “*Star Legend*” rute Singapura – Bali, Indonesia. Dengan membawa 185 penumpang atau wisatawan manca negara dan 160 awak (Andi S., 2018). Selain itu, Pulau Bawean pernah menjadi tempat salah satu kegiatan *Sail to Indonesia* pada 2018 yang dihadiri 120 kapal *yacht* dari berbagai negara. Uniknya, meski agenda ini untuk memperkenalkan pariwisata Pulau Bawean pada pihak luar, namun pembangunan pariwisata yang dikelola secara maksimal hanya di Pantai Mombhul sebagai lokasi dari agenda tersebut dan Pantai Mombhul merupakan pantai yang dimiliki oleh swasta yang tidak lain ialah elit politik dari Bawean yang berada di Jakarta.

Pembangunan memang perlu dilaksanakan di Pulau Bawean, baik itu pembangunan pariwisata, pembangunan infrastruktur maupun transportasi sebagai pendukung dari jalannya pariwisata. Artinya, pembangunan-pembangunan tersebut saling berhubungan satu sama lain. Pembangunan di Pulau Bawean perlu di perkuat dengan implementasi sebagai turunan dari kebijakan Kabupaten Gresik yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Adanya RPJMD sebagai dasar dari awal kebijakan dibuat maka harus memberikan rasa keadilan dengan masyarakat, baik yang berdomisili di Gresik kota ataupun pada masyarakat kepulauan.

Bawean Dalam Kepemiluan

Pemilu yang merupakan salah satu instrumen pelaksanaan demokrasi menjadi awal putusan mencari pemimpin yang digadagadangkan oleh masyarakat Bawean, melalui pemilu masyarakat Bawean berharap ada kemajuan di Pulau Bawean dari berbagai sektor. Akan tetapi sikap masyarakat Bawean pada pemilu menunjukkan sikap mayoritas apatis pada pemilu. Kondisi ini dikarenakan berbagai

faktor yang melatar belakangnya, seperti rasa kecewa masyarakat pada elit politik dengan janji-janjinya di masa kampanye namun tidak diimplementasikan saat terpilih. Kurangnya sosialisasi dalam mempromosikan dirinya (elit politik) serta program-program yang ditawarkan pada masyarakat sehingga masyarakat enggan untuk memilih dan berdampak dengan tidak berpartisipasi pada waktu pencoblosan.

Partisipasi masyarakat Bawean pada pemilu menggambarkan apatis, namun tidak pada pemilihan kepala desa, pada pemilihan kepala desa di pulau Bawean tingkat partisipasi masyarakat Bawean begitu tinggi dibandingkan dengan pemilihan yang lain. Hal ini bisa dilihat pada beberapa tabel di bawah ini. Pada data partisipasi politik masyarakat Pulau Bawean dalam tulisan ini hanya memaparkan hasil pemilu yang memiliki dampak langsung atau berdekatan dengan masyarakat Pulau Bawean seperti Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik, Pemilihan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gresik dan Pemilihan Kepala Desa di seluruh Pulau Bawean.

Tabel 1 Partisipasi Masyarakat di Pulau Bawean Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015

Kecamatan	Jumlah Pemilih	Perolehan Suara		
		Sah	Tidak Sah	JML Suara (3+4)
1	2	3	4	5
Sangkapura	47.845	22.563	379	22.942
Tambak	24.959	11.885	224	12.109

Sumber: data diolah dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, 2019

Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwasanya tingkat partisipasi masyarakat Pulau Bawean pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik sangat rendah, artinya dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diharuskan untuk mengikuti pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik hanya setengah dari DPT yang telah ditetapkan sebelumnya. Masyarakat Bawean pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik begitu kurang dalam mengikuti partisipasi politik pemilihan. Dari DPT yang di miliki Kecamatan Sangkapura pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik tahun 2015 sebesar 47.845, jumlah pemilih yang berpartisipasi hanya 22.942

yang itu artinya 24.903 tidak ikut dalam memilih atau tidak hadir dalam pemilihan. Kecamatan Tambak yang memiliki DPT sebanyak 24.959 hanya 12.109 orang yang ikut berpartisipasi sedangkan 12.850 tidak hadir, ini menunjukkan bahwasanya kurangnya kesadaran masyarakat yang ikut berpartisipasi politik dalam kemajuan daerah Kabupaten yang tidak lain Bawean sendiri bagian dari Kabupaten Gresik.

Partisipasi masyarakat Bawean pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik pada tahun 2015 tidak mencapai 50% dari total jumlah pemilih, hal ini bisa dilihat pada pemaparan tabel 1. Pada pemilu yang notabeneanya sebagai pemilihan untuk wilayah kabupaten merupakan kontestasi bagi kandidat kepala daerah, sehingga masyarakat pulau Bawean pun ikut serta dalam pemilu, tidak kenalnya masyarakat dengan latar belakang calon kepala daerah membuat masyarakat apatis pada pemilihan. Anggapan masyarakat pada pemilu hanya sebagai formalitas tanpa mengenal calon dan visi-misi serta program-program yang ditawarkan pada masyarakat. Selama ini pada pemilu kandidat kurang dalam memperkenalkan dirinya pada masyarakat Bawean, sehingga kedekatan antara calon kepala daerah dengan masyarakat Bawean dinilai sangat kurang.

Jika dilihat dari prespektif politik, tidak ikut sertanya masyarakat di pemilu sebagai pemilih menjadi salah satu hilangnya peran dari demokrasi, akan tetapi jika ditinjau dari prespektif pemikiran masyarakat, untuk tidak mengikuti pemilihan kepala daerah merupakan kegagalan kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik pada masyarakat Pulau Bawean.

Awal hilangnya kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi pada pemilu lebih dikarenakan rusaknya sistem birokrasi pemerintahan di Kabupaten Gresik sendiri. Secara nyata dalam melakukan pembangunan bagi kemajuan masyarakat Bawean, system yang ada dirasa sangat sulit bahkan bertele-tele, satu contoh kasus jika menjelang arus mudik lebaran pelayanan transportasi kapal laut menuju Bawean dari Gresik selalu lemah (Wijayanto, 2019), banyaknya calo dalam penjualan tiket membuat masyarakat selalu tidak kebagian tiket, bahkan tiket dijual secara mahal di atas harga normal., yang mana hal ini bukan lagi rahasia umum. Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai pemimpin yang memiliki *power* atas kuasa

daerah sudah seharusnya memberikan ketegasan pada pihak swasta kapal laut untuk segera di lakukan penjualan tiket secara *online*, jika tidak diberlakukan maka bisa diberikan sanksi untuk angkat kaki pada pelayanan transportasi laut rute Gresik - Bawean. Disisi lain, pemerintah juga harus ikut andil dalam meningkatkan pelayanan, namun kenyataannya permasalahan ini terus terjadi berulang-ulang.

Permasalahan yang sering dialami oleh masyarakat Pulau Bawean membuat masyarakat memiliki persepsi apatis pada Pemerintah Kabupaten Gresik. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat partisipasi pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gresik dan juga dari hasil wawancara dengan masyarakat.

Setelah dilakukan pendataan terhadap masyarakat Bawean karena memiliki tingkat partisipasi yang paling rendah dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Gresik, faktor lain dari tidak berpartisipasi pada pemilu di pulau Bawean adalah banyaknya masyarakat yang berada diluar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunai Darussalam dan lain-lain. Masyarakat Bawean yang berada di negara-negara tersebut untuk mencari pekerjaan yang dirasa sulit mendapatkan pekerjaan di Bawean dengan kebutuhan yang tidak sedikit, bahkan ada yang telah berkeluarga dan menetap disana. Sehingga banyak nama-nama yang terdaftar sebagai DPT pada saat pemilu tetapi orang yang memiliki nama-nama tersebut tidak ada di Bawean. (Wawancara S, Maret 2019)

Tabel 2. Partisipasi Masyarakat di Pulau Bawean Pada Pemilihan DPRD Kabupaten Gresik 2014

Kecamatan	Jumlah Pemilih	Perolehan Suara		
		Sah	Tidak Sah	JML Suara (3+4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Sangkapura	43.029	24.430	723	25.153
Tambak	25.559	12.977	473	13.450

Sumber: data diolah dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, 2019

Pada tabel 2 partisipasi politik masyarakat Pulau Bawean pada pemilihan legislatif Kabupaten Gresik terbilang masih 70% menggunakan hak pilihnya untuk memilih anggota dewan di pemerintahan Kabupaten Gresik. Kecamatan

Sangkapura memiliki DPT 43.029 dengan jumlah partisipasi yang hadir sebanyak 25.153 dan pemilih yang tidak hadir sebanyak 17.876. Untuk Kecamatan Tambak memiliki DPT 25.559 dan yang hadir dalam partisipasi pileg sebanyak 13.450 dan yang tidak hadir sebanyak 12.109.

Berbeda dengan partisipasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik, partisipasi politik masyarakat Bawean pada pemilihan legislatif DPRD lebih unggul, peningkatan partisipasi masyarakat Bawean pada pemilihan legislatif Kabupaten Gresik karena memiliki keterwakilan masyarakat Bawean untuk maju pada kursi parlementer. Melalui pemilihan legislatif dengan cakupan wilayah yang kecil bagi kandidat, membuat masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilu, hal ini karena masyarakat Bawean kenal pada kandidat yang maju melalui pemilihan legislatif walaupun tidak kenal secara langsung tetapi masyarakat mengetahui tempat tinggal kandidat bahkan memilih karena masih memiliki hubungan keluarga ataupun mengetahui dari temannya.

Walaupun tingkat partisipasi pada pemilihan legislatif lebih unggul dibandingkan pada pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif di Pulau Bawean paling rendah tingkat partisipasinya jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lain di Kabupaten Gresik. Artinya pemilihan umum di Pulau Bawean masih lemah partisipasinya dengan daerah lain.

Alasan politik masyarakat Pulau Bawean tetap sama pada pemilihan umum yang lain karena kekecewaan masyarakat Bawean pada elite politik, selain itu kesadaran politik masyarakat sangat kurang hal ini tidak adanya pendidikan politik masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah pegunungan dan daerah pesisir, masyarakat beranggapan lebih baik bekerja mencari duit untuk kehidupan keluarga dari pada ikut bingung memikirkan pemilihan pemimpin yang tidak kenal bahkan belum tentu bernasib baik pada dirinya.

Namun, tingginya partisipasi masyarakat di pemilihan legislatif dari pada pemilihan kepala daerah, karena di pemilu legislatif terdapat masyarakat yang mengikuti pemilihan sehingga mobilisasi pemilih lebih terarah dari pada pilkada. Pada pemilihan legislative, terdapat banyak keterwakilan masyarakat Pulau Bawean yang ikut bertarung di kontestasi perebutan

kursi DPR, dari partai yang lama hingga partai yang terbaru. Melalui sanak keluarga, kerabat, dan teman diminta dukungan untuk mencoblos kandidat tersebut. Kemudian, tidak sedikit *money politics* dalam pileg ini mengingat banyak kandidat yang berasal dari Bawean.

Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa merupakan partisipasi yang tertinggi jika dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan yang lain seperti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik ataupun Pemilihan Legislatif, hal ini sangat jelas terlihat perbedaan partisipasi masyarakat Bawean yang sangat antusias pada pemilihan kepala desa. Kesadaran tertinggi masyarakat Bawean pada pemilihan kepala desa karena kedekatan emosional pada pemimpin artinya masyarakat lebih nyaman dan lebih mudah dalam mengurus

segala sesuatu dengan kepala desa, serta sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan harapan-harapan masyarakat dari bawah melalui pemimpin kepala desa, tak heran partisipasi masyarakat tinggi terhadap pemilihan kepala desa.

Pada pemilihan kepala desa, masyarakat Bawean memiliki partisipasi yang sangat tinggi, tingginya partisipasi pada pilkades merupakan antusias masyarakat untuk berupaya mencari pemimpin yang di inginkan, seperti dari gaya memimpin, kehidupan sosialnya serta latar belakang calon kepala desa, hal ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk memilih dan terlibat aktif pada pemilihan kepala desa melalui hak suaranya sebagai pemilih. Dengan demikian pelaksanaan pemilihan kepala desa dinilai ramai keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi pada pelaksanaan pilkades.

Tabel 3. Partisipasi Politik Masyarakat Pulau Bawean Pada Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Desa	DPT			Partisipasi	
			Laki-laki	Perempuan	JML DPT (4+5)	Hadir	Tidak Hadir
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sangkapura	Pudakit Timur	525	275	800	771	29
		Pudakit Barat	690	422	1.112	1107	5
		Suwari	702	758	1.460	1.422	38
		Dekat Agung	849	704	1.553	1.536	17
		Sidegodungbatu	2.001	1116	3.117	3.071	46
		Daun	2.479	1.798	4.277	4.209	68
		Bulu Lanjang	1.179	1.036	2.215	2.172	43
		Lebak	1.709	1.199	2.908	2.808	100
		Kumalasa	2090	1.717	3.807	3.717	90
		Sungai Teluk	1.750	1.100	2.850	2.763	87
		Kotakusuma	1.600	1.205	2.805	2.709	96
		Sawah Mulya	1.303	979	2.282	2.197	85
		Patar Selamat	1.461	1.217	2.678	2.624	54
		Gunung Teguh	1.411	1.501	2.912	2.854	58
		Balik Terus	1.400	925	2.325	2.307	18
		Sungai Rujing	725	625	1.350	1.344	6
		Kebun Teluk Dalam	1.407	1.250	2.657	2.641	16
		Tambak	1.490	1.309	2.799	2.770	29
		Tanjung Ori	2.130	2.020	4.150	4.131	19
		2	Tambak	Paromaan	975	825	1.800
Grejag	155			146	301	280	21
Sukalela	401			318	719	707	12
Teluk Jati	1.370			1.328	2.698	2.672	26
Pekalongan	291			224	515	497	18
Kepuh Teluk	1.408			937	2.345	2.303	42
Kepuh Legundi	206			204	410	401	9
Diponggo	124			126	250	242	8
Gelam	502			473	975	971	4
Kelompok Gubuk	462			408	870	861	9
Sukaoneng	322	203	525	521	4		

Sumber: *Data diolah peneliti 2019*

Rekapitulasi hasil pemilihan kepala desa di Pulau Bawean menjadi saksi bahwasanya partisipasi masyarakat pada pilkades sangat tinggi, berbeda dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik dan Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Gresik serta pemilu yang lain, pilkades menjadi pemilihan yang memiliki sejarah paling tinggi tingkat partisipasinya. Sesuai dengan pemaparan tabel 3 menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat pada pilkades.

Masyarakat Bawean lebih senang dalam mengikuti pemilihan kepala desa, hal ini bukan tanpa alasan. Masyarakat tertarik pada pilkades karena masyarakat ingin ada pemerintah yang mampu mendengarkan aspirasi masyarakat, walaupun secara nyata kurangnya perhatian pada pemerintah pusat maupun daerah setidaknya pemerintah desa menjadi sandaran bagi masyarakat Bawean dalam melakukan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.

Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa menjadi perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan pemilihan lain. Hal ini tidak bisa dipungkiri, masyarakat Bawean lebih paham dengan permasalahan yang dimilikinya di setiap desa dan keperluan yang dibutuhkan oleh masing-masing desa, jika pemerintah daerah dan pusat tidak bisa mendengarkan masyarakat setidaknya pemerintah desa hadir ditengah masyarakat sebagai perwujudan hadirnya negara.

Partisipasi yang dimiliki oleh pilkades menjadi partisipasi yang unggul dari pemilihan lain, karena masyarakat Bawean lebih nyaman pada pilkades, masyarakat lebih mengenal calon kepala desanya mulai dari latar belakang calon kepala desa ataupun karakteristik setiap calon sehingga masyarakat bisa menentukan hak pilihnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Jika pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Gresik, masyarakat tidak kenal pada calonnya, bagaimana latar belakangnya, dan kandidat tersebut tidak melakukan kampanye secara langsung di Pulau Bawean bahkan ketika terpilih tidak melakukan kegiatan langsung sebagai bentuk sapa pada masyarakat yang masih menjadi bagian dari Kabupaten Gresik, sehingga masyarakat tidak antusias dalam pemilihan kepala daerah pada level kabupaten.

Tingginya tingkat partisipasi pada pemilihan kepala desa karena sistem pilkades yang bisa

dibidang sedikit berbeda dengan pemilu, artinya pada saat waktu pemilihan kepala desa yang telah dilakukan pembentukan panitia pilkades merangkap ulang di wilayah desa tersebut, jadi tidak ada pemilih yang tidak memilih secara percuma. Ini yang membuat berbeda dengan pemilu lain, DPT pada pilkades merupakan DPT aktif yang nanti bisa mensukseskan jalannya pilkades, akan tetapi DPT pada pemilu merupakan DPT yang orangnya tidak berada pada saat pemilihan, sehingga ada ketimpangan jumlah pemilih dalam melakukan pemilihan. Akan tetapi secara *research* pemilihan kepala desa di pulau Bawean tetap menjadi primordial pemilihan yang utama bagi masyarakat.

Pilkades Harapan Masyarakat Bawean

Masyarakat Bawean menganggap bahwasanya pemilihan kepala desa merupakan pemilihan yang aman dan nyaman, karena hanya mencakup wilayah yang kecil dan telah mengetahui sikap dan kepribadian calon kepala desa. Melalui data partisipasi yang telah dipaparkan sebelumnya bahwasanya tingkat partisipasi yang paling tinggi berada pada pilkades, artinya masyarakat menaruh harapan lebih pada pemilihan kepala desa. Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UURI, 6:2014). Artinya urusan pemerintahan ataupun kepentingan masyarakat menjadi utama dalam mengutarakan pendapat di birokrasi terkecil. Pemilihan kepala desa yang tidak diusung oleh partai politik membuat calon kandidat kepala desa harus melakukan pendekatan secara eksplisit kepada masyarakat. Pada sistem pemilihan tanpa partai politik bukanlah suatu hal yang muda untuk dilakukan, sehingga pilkades yang pemilihannya telah diatur oleh otonomi desa menjadi pemilihan yang berbeda dengan pemilu.

Dengan demikian, masyarakat tetap menaruh partisipasi tinggi pada pilkades, hal ini karena kedekatan emosional antara kepala desa dengan masyarakat. Selain itu rasa sosial masyarakat Bawean sangat tinggi, artinya jika calon kepala desa berasal dari kerabat atau tetangga atau masih dalam wilayah satu

kampung memberikan dukungan tinggi pada calon tersebut. Kemudian karakter calon yang tegas dan bijaksana layaknya pemimpin yang diharapkan oleh rakyat sejahtera, menjadi modal utama dalam pemenangan di pilkades. Masyarakat lebih tertarik dan berharap pada pilkades karena komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah lebih mudah untuk disampaikan.

Banyak persepsi yang masyarakat sampaikan atas ketertarikannya pada pilkades seperti yang disampaikan Edy Faiz bahwasanya lebih cenderung ke pilkades, karena pemimpin desa yang tahu tentang desa, sedangkan jika memilih legislatif masyarakat tidak paham, yang mengerti desa itu yah pilkades itu, yang mengerti kebijakan pilkades itu. Selain itu pilkades lebih dekat dengan masyarakat dan lebih bersentuhan dengan masyarakat (Wawancara, EF Maret 2019).

Masyarakat Bawean berpartisipasi tinggi pada pilkades karena masyarakat menganggap bahwasanya di pemerintahan, hanya pemerintah desa yang mengerti dan memahami apa yang diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi walaupun demikian masyarakat tidak meninggalkan sebagai warga negara demokrasi untuk kehilangan haknya memilih pada pemilu yang lain. Bagi masyarakat lain pemilu itu penting untuk keberlangsungan suatu daerah, namun pemerintah yang mengerti dan memahami serta dampak-dampak yang dirasakan secara langsung yakni pemerintahan desa yang dipilih melalui pilkades, maka dari itu masyarakat lebih tertarik pada pemilihan kepala desa.

Kemudian ada yang memilih pilkades karena lebih menyentuh masyarakat dan bisa merasakan akibatnya pembangunan tersebut yang dampaknya langsung berimplikasi kepada masyarakat (Wawancara, IP Maret 2019). Selain itu ada anggapan masyarakat bahwa legislatif sama daerah biasa saja di Bawean. Akan tetapi hal itu berbeda dengan dengan kepala desa yang dirasa benar-benar nyata dampak dan hasilnya seperti apa (Wawancara, AR Maret 2019). Pilkades mencakup semua masyarakat-masyarakat di wilayah-wilayah kecil, artinya adanya pilkades mampu memberikan sumbangsiah atau lebih dekat pada masyarakat yang kurang mampu (Wawancara, SH Maret 2019).

Masyarakat dalam responden penelitian ini mayoritas memilih pemilihan kepala desa

sebagai pemilihan yang berpengaruh pada keberlangsungan kesejahteraan masyarakat selama lima tahun kedepan, dan karenanya masyarakat antusias menyambut pemilihan kepala desa. Hal ini menunjukkan adanya harapan yang sangat besar untuk melaksanakan pembangunan di wilayah terkecil menjadi prioritas untuk mengikuti partisipasi di pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan tumpuhan masyarakat untuk mengubah kondisi yang ada di masyarakat, artinya dengan aktifnya birokrasi desa membuat keterlibatan masyarakat ikut berperan dalam berpartisipasi jika ada masalah dalam komunitas desa, peran masyarakat tersebut di implementasikan pada partisipasi politik pemilihan kepala desa.

Pilkades menjadi pemilihan yang banyak di senangi oleh masyarakat Bawean, persepsi dan ketertarikan masyarakat pada pilkades merupakan kunci kemenangan bagi calon kepala desa yang tidak diusung melalui partai politik. Kepala desa yang memimpin birokrasi terkecil dalam satu wilayah harus mampu melaksanakan pembangunan-pembangunan di desa dan menciptakan relasi pada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemilihan kepala desa memiliki proses yang lebih ringan, dan tidak memerlukan proses yang lama ataupun melakukan kampanye-kampanye yang besar (Wawancara, SDN Maret 2019). Jika terjadi suatu masalah dalam masyarakat peran pemerintah yaitu kepala desa lebih lebih enak diselesaikan (Wawancara, SI Maret 2019).

Selain itu, pilkades merupakan bentuk partisipasi politik yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi siapa calonnya itu lebih keliatan kepada masyarakat, karena itu orang-orang terdekat didesa itu. Jadi siapa yang bekerja di desa itu sangat nampak, sehingga kalau lihat hasil-hasil pilkades merupakan pemilihan yang sehat, normal. Artinya, mereka yang jadi benar-benar bermutu dibanding mereka yang tidak jadi. Ini terbukti banyak kepala desa yang tidak berkuasa satu periode tapi bisa dua bahkan tiga periode, karena memiliki kualitas kerja yang bagus yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan tidak ada penyimpangan yang besar. Kalau didapatkan kasus penyimpangan, masyarakat akan mengetahui secara langsung (Wawancara RAZ, Maret 2019).

Harapan tinggi pada masyarakat didorong dengan kinerja kepala desa yang baik, tegas, dan

bijaksana, serta mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka tidak sedikit pada saat pelaksanaan pilkades, kepala desa sebelumnya mengikuti pemilihan ulang untuk bisa menjabat kembali pada periode berikutnya, hal ini didukung penuh oleh masyarakat dengan memilih kepala desa sebelumnya untuk memimpin desa tersebut.

Latar belakang ketertinggalan pembangunan di Bawean serta banyaknya pemilihan membuat masyarakat Bawean memiliki pandangan apatis terhadap sistem demokrasi elektoral yang berlangsung karena setelah pemilu, kondisi masyarakat masih sama dengan yang dulu. Artinya pengaruh pada pemilu tidak ada perubahan yang terjadi pada Pulau Bawean. Namun pada pilkades, masyarakat lebih aktif untuk mengkritisi apabila terjadi kesalahan dalam birokrasi desa, sehingga pilkades menjadi pemilihan yang masyarakat senangi.

Hasil penelitian ini, jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa masyarakat Pulau Bawean mayoritas berpartisipasi pada pemilihan kepala desa dibandingkan dengan pemilihan umum yang lain. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwasanya pemilih tertarik dan untuk mencoblos pada saat pemilu melihat dari program yang di tawarkan kandidat politik dan juga visi-misi serta latar belakang pribadi elite politik tersebut, kemudian politik aliran masih menjadi peran yang aktif, selanjutnya tidak tertariknya masyarakat pada pemilihan karena tidak percaya dengan janji-janji yang diberikan partai politik dan elite politik. Temuan peneliti terdahulu masih dirasakan dalam penelitian di Bawean, namun yang membuat berbeda dengan peneliti terdahulu yakni penelitian ini melihat ketertarikan masyarakat Pulau Bawean pada semua pemilu, dan temuan dari penelitian ini bahwasanya masyarakat lebih tertarik pada pilkades dengan alasan karena pemimpin desa yang mengetahui tentang desa, sedangkan jika memilih legislatif masyarakat tidak mengerti calon-calon legislatif serta tidak semua anggota legislatif paham dengan apa yang masyarakat inginkan, yang mengerti kondisi desa dan kebijakan-kebijakan yang di rumuskan pada masyarakat yakni pemerintahan desa.

SIMPULAN

Pemilihan kepala desa di Pulau Bawean menjadi pemilihan yang menarik bagi masyarakat yang

induk pemerintahannya adalah Kabupaten Gresik. Tidak adanya pembangunan yang signifikan layaknya Gresik kota membuat masyarakat Pulau Bawean merasa terasingkan dengan apa yang dimiliki daratan Gresik, sehingga masyarakat mempunyai persepsi dengan adanya pemilihan umum yang selama ini menjadi syarat demokrasi tidak berdampak pada masyarakat. Pemilihan kepala desa memiliki partisipasi yang tinggi karena masyarakat Bawean menaruh harapan besar pada pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa menjadi pemilihan yang sangat disenangi oleh masyarakat Bawean karena permasalahan yang ada di dalam masyarakat serta kemauan masyarakat hanya pemerintah desa yang paham dan mengerti, sehingga rumusan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa benar-benar pro terhadap masyarakat. Melalui pemilihan kepala desa masyarakat Bawean berharap adanya perubahan atau pembangunan yang menjadi tempat tinggal masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Andi S. (2018). Kapal Pesiar Star Legend Singgah di Pulau Bawean. Diakses dari (<http://beritagresik.com/lifestyle/wisata/28/12/2018/kapal-pesiar-star-legend-singgah-di-pulau-bawean.html>) pada tanggal 26 Mei Februari 2019.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. (2019). Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Dirinci Menurut Kecamatan. Gresik: Badan Pusat Statistik.
- Budiatjo, M. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia anggota IKAPI.
- Gadjong, A.A. (2007). *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Hidajat, I. (2012). *Teori-Teori Politik*. Malang: SETARA Press.
- Husaeni, U.A. (2017). Potensi Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri (Studi di Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur). *Journal of Empowerment*, 1, (1), 1-12.

- Hutomo, R.R. (2015). Perilaku Memilih Warga Surabaya Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Hubungan Kesesuaian Program Kandidat, Kampanye, Identifikasi Partai dan Pemberian Imbalan Uang dalam Menentukan Pilihan Partai Politik dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014). *Jurnal Politik Muda*, 4, (1), 50–60.
- Liando, D.M. (2016) Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3, (2), 14-28.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*, Singapore: SAGE Publications Asia-Pacific Pte. Ltd.
- Rush, M., & Altrhrof, P. (2001). *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yustiningrum, RR.E., & Ichwanuddin, W. (2015). Partisipasi Politik dan perilaku Memilih Pada Pemilu 2014. *Jurnal Penelitian Politik*, 12, (1), 117–135.
- Wijayanto. (2019). Diakses dari <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/05/25/138849/dewan-minta-penjualan-tiket-kapal-online-ke-bawean> pada tanggal 26 Mei 2019.